

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2008-2009
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BKKBN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 16 Februari 2009
Pukul	: 15.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membicarakan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009; 2. Membicarakan Masalah-masalah Aktual Yang Berhubungan Dengan Bidang Tugas BKKBN; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Hasanudin Said, Ak/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Anggota yg hadir	: orang anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI, ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dibuka pukul 15.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

Paparan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional antara lain :

1. Jawaban/tanggapan atas pertanyaan tertulis Anggota Komisi IX DPR RI.
2. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2008, terdiri dari Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil dan Realisasi Anggaran Tahun 2008.
3. Masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BKKBN.
(seperti diuraikan dalam buku).

III. USUL/MASUKAN ANGGOTA

1. Sejuahmana korelasi fakta yang ditemukan oleh BKKBN dalam penelitian yang menyebutkan 60% anak usia sekolah telah melakukan hubungan sex.
2. Bagaimana upaya BKKBN dalam mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS di Kab. Singkawang, Kalimantan Barat, karena daerah ini termasuk urutan tertinggi di Indonesia dalam hal penyebaran HIV/AIDS. Data yang dibuat oleh BKKBN apakah mempunyai korelasi dengan data yang dibuat daerah dalam rangka mendukung tugas BKKBN di daerah. Berapa jumlah tenaga penyuluh KB yang dibutuhkan BKKBN yang diusulkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Apakah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak tumpang tindih dengan Program Bina Keluarga Balita. BKKBN perlu melakukan sinergi terhadap kedua program tersebut mengingat program tersebut sama-sama mendidik anak, serta perlu dilakukan koordinasi dengan Depdiknas.
4. Bagaimana kelanjutan Program Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga pada saat ini, yang dahulu dicanangkan oleh Dr. Hayono Suyono, karena keberadaan program ini sangat bagus bagi kaum ibu. Program ini disarankan dapat dilanjutkan serta didukung oleh pemerintah.
5. Saat ini pemakaian Pil KB saat ini tidak lagi menjadi prioritas dan pilihan peserta KB, namun pada saat diadakan seminar kedokteran di Denpasar Bali terungkap bahwa pil KB dapat membuat kulit muka menjadi lebih halus dan tubuh menjadi lebih langsing. BKKBN perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif di daerah yang pencapaian program KB nya belum maksimal. BKKBN juga perlu menjelaskan kepada masyarakat agar penggunaan alat kontrasepsi tidak menjadikan peluang bagi remaja/masyarakat untuk melakukan seks di luar nikah.
6. Mendukung diadakannya kerjasama dengan TNI/Polri dalam hal pemantapan revitalisasi program KB Nasional yang meliputi advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program KB nasional, penggerakan dan kemitraan, pelayanan KB, peringatan dan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, dukungan sarana dan prasarana, serta pelaporan monitoring dan evaluasi. Mendukung diadakannya penyuluhan KB di sekolah-sekolah. Mohon dijelaskan, dimana letak 3 aspek pencitraan pada logo BKKBN yang baru.
7. Apakah perlu kajian ulang terhadap Amandemen RUU No.10 tahun 1992 tentang Kependudukan, karena keberhasilan program KB tak lepas dari dukungan keberadaan payung hukumnya, sehingga Pimpinan lembaga BKKBN dapat sejajar dengan Kementerian Negara.

IV. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

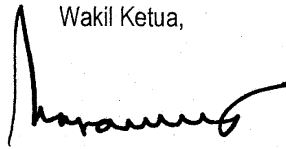
1. Komisi IX DPR RI memahami program kerja yang telah dilaksanakan BKKBN dan akan mendukung upaya peningkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan BKKBN, khususnya untuk lebih optimalnya program-program prioritas BKKBN.
2. Komisi IX DPR RI mendukung BKKBN dalam program kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam memberikan pemahaman, pengetahuan serta perilaku positif remaja sehingga remaja Indonesia terhindar dari penyimpangan perilaku seksual atau hubungan seksual terlalu dini dan berbagai implikasinya seperti aborsi, angka kematian bayi yang tinggi, dan lain-lain.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk meningkatkan advokasi dan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) lebih digiatkan dan

diberikan dukungan alokasi anggaran yang memadai sehingga sejajar dengan kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). BKKBN juga diharapkan untuk mencari sinergi antara kegiatan BKB dan PAUD, misalnya dalam bentuk kesepakatan bersama antara BKKBN dan Depdiknas.

4. Komisi IX DPR RI mendukung BKKBN dalam pengusulan tambahan formasi pengadaan PNS untuk penyuluh keluarga berencana, sesuai dengan surat BKKBN Nomor 1116/KT.001/B2/2007 yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB

Jakarta, 16 Februari 2009
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



HASANUDIN SAID, Ak